

Gaya Komunikasi Anggota DPRD dalam Talkshow Media: Studi Kualitatif pada Politisi Kota Surabaya

Eli Susanti¹, Nur'annafi Farni Syam Maella², Harliantara³

^{1,2,3} Universitas Dr. Soetomo

Email: nurannafi@unitomo.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis gaya komunikasi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya dalam talkshow media serta memahami keterkaitannya dengan identitas partai, karakteristik daerah pemilihan (dapil), dan strategi komunikasi politik yang diterapkan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus dan paradigma konstruktivisme. Subjek penelitian dipilih secara purposif, terdiri atas lima anggota DPRD dari berbagai fraksi dan dapil yang aktif sebagai narasumber dalam program talkshow televisi maupun digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gaya komunikasi yang ditampilkan oleh para anggota DPRD bersifat variatif dan dipengaruhi oleh latar belakang profesional, konteks dapil, serta citra partai politik. Gaya komunikasi verbal yang digunakan meliputi gaya lugas, solutif, naratif, teknis, hingga persuasif. Sementara gaya nonverbal ditunjukkan melalui ekspresi wajah, intonasi, kontak mata, dan postur tubuh yang memperkuat pesan verbal. Strategi komunikasi dalam talkshow difokuskan pada penyampaian pesan yang efektif, adaptif, dan sesuai dengan karakter audiens serta isu aktual yang dibahas. Penelitian ini menyimpulkan bahwa gaya komunikasi anggota DPRD merupakan strategi politik yang disesuaikan dengan konteks sosial, ideologis, dan media, serta menjadi instrumen penting dalam membangun citra dan kepercayaan publik di era komunikasi politik digital.

Kata Kunci: *Gaya Komunikasi, Talkshow, DPRD, Media Massa, Strategi Komunikasi.*

ABSTRACT

This study aims to analyze the communication styles of members of the Surabaya City Regional People's Representative Council (DPRD) in media talk shows and understand their relationship to party identity, electoral district characteristics, and the political communication strategies implemented. The study used a qualitative approach with a case study method and a constructivist paradigm. The research subjects were selected purposively, consisting of five DPRD members from various factions and electoral districts who are active as resource persons in television and digital talk show programs. The results show that the communication styles displayed by DPRD members are varied and influenced by their professional backgrounds, electoral district context, and the image of the political party. The verbal communication styles used include straightforward, solution-oriented, narrative, technical, and persuasive styles. Meanwhile, nonverbal styles are shown through facial expressions, intonation, eye contact, and body posture that strengthen the verbal message. Communication strategies in talk shows are focused on delivering messages that are effective, adaptive, and appropriate to the character of the audience and the current issues discussed. This study concludes that the communication styles of DPRD members are political strategies adapted to the social, ideological, and media contexts, and are an important instrument in building public image and trust in the era of digital political communication.

Keywords: *Communication Style, Talk Show, DPRD, Mass Media, Communication Strategy.*

PENDAHULUAN

Gaya komunikasi bukan semata soal kemampuan berbicara, melainkan menjadi elemen krusial dalam membentuk citra politik seorang wakil rakyat. Terutama bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), gaya berkomunikasi mencerminkan identitas politik dan menjadi sarana strategis dalam membangun kepercayaan public (Muchtari, 2016). Komunikasi politik, sebagaimana dijelaskan oleh Alwi Dahlan dalam Cangara (2009), adalah proses

penyampaian pesan politik melalui simbol-simbol dan lambang-lambang yang digunakan oleh individu atau kelompok untuk memengaruhi pemikiran, sikap, dan perilaku Masyarakat (Cangara, 2009). Komunikasi politik adalah proses penyampaian pesan-pesan politik dari elit politik kepada khalayak secara timbal balik sehingga pesan-pesan politik yang disampaikan memperoleh respon yang diharapkan (Fsm, 2018). Proses ini bukan sekadar menyampaikan informasi, tetapi bertujuan memperluas wawasan, mengubah persepsi, dan menciptakan ikatan emosional antara politisi dan konstituennya. Seorang politisi tidak hanya dinilai dari isi ucapannya, tetapi juga dari bagaimana pesan itu dikemas. Pilihan diksi, artikulasi, intonasi, hingga gestur tubuh dan ekspresi wajah turut membentuk persepsi publik terhadap kredibilitas dan integritas mereka (Pureklolon, 2018). Di era digital yang semakin mediatik, talkshow televisi atau kanal daring menjadi ruang strategis yang tak bisa diabaikan. Seperti disampaikan oleh Heryanto (2018), media massa saat ini terutama format talkshow memiliki pengaruh besar dalam membentuk opini public (Heryanto, 2018). Talkshow bukan sekadar ruang bicara, tetapi menjadi panggung di mana politisi dituntut untuk tampil interaktif, responsif, dan komunikatif dalam menyampaikan isu. Talkshow memberi kesempatan bagi anggota DPRD untuk menjelaskan kebijakan, mengartikulasikan kepentingan rakyat, hingga merespons berbagai kritik secara langsung. Tak seperti pidato formal atau debat politik yang sering kaku, talkshow membuka ruang komunikasi dua arah yang cair antara narasumber dengan pembawa acara, bahkan dengan audiens secara lebih luas (MAJID, 2023). Komunikasi dua arah, oleh karena itu diperlukan kerja sama untuk mencapai tujuan, baik tujuan pribadi maupun tujuan kelompok, untuk mencapai suatu tujuan (Pertiwi Hele et al., 2018). Kemampuan berkomunikasi akan menentukan keberhasilan seorang politisi dalam menyampaikan setiap gagasannya (Farni Syam Maela et al., 2018). Keberhasilan seorang politisi dalam talkshow tidak hanya dinilai dari seberapa kuat argumennya, tetapi juga dari bagaimana ia menyusun narasi dan membawakan pesan dengan cara yang menyentuh dan mudah diterima.

Di Surabaya, kompleksitas sosial dan dinamika politik yang tinggi semakin mempertegas pentingnya komunikasi politik yang efektif. Sebagai kota besar dengan masyarakat urban, kritis, dan melek media, warga Surabaya menuntut politisi yang mampu berbicara secara jelas, terbuka, dan substansial (Santoso, 2017). Para anggota DPRD di kota ini tidak hanya dihadapkan pada beragam persoalan publik, tetapi juga pada keharusan menjangkau masyarakat dari berbagai latar belakang sosial, ekonomi, dan budaya (Supriadi, 2017). Di sinilah media terutama talkshow di televisi atau platform digital memainkan peran vital sebagai penghubung antara para wakil rakyat dan warga kota (Haris et al., n.d.). Namun demikian, tidak semua anggota DPRD memiliki keterampilan komunikasi yang cukup untuk tampil optimal di media. Meskipun secara politik mereka berpengalaman, tampil dalam talkshow menuntut kompetensi komunikasi yang berbeda – yakni kemampuan mengelola bahasa tubuh, intonasi, hingga spontanitas menyusun argumen yang persuasif dan menarik (Fadillah et al., 2017). Format talkshow yang dinamis dan cenderung berkembang secara improvisatif sering kali menjadi tantangan tersendiri, terutama bagi anggota dewan yang terbiasa dengan forum resmi yang lebih terstruktur. Lebih dari itu, pembahasan dalam talkshow dapat bergulir ke berbagai arah yang menuntut penguasaan terhadap isu-isu spesifik yang relevan dengan tugas pokok mereka. Tantangan lain yang tak kalah penting adalah bagaimana media dapat membentuk citra politik seorang narasumber. Apa yang disampaikan di talkshow sangat mudah dikutip, disebarluaskan, bahkan dipotong-potong untuk dikemas ulang di berbagai platform digital. Ketidaktepatan gaya komunikasi atau penyampaian yang kurang cermat bisa

berujung pada kesalahpahaman publik, bahkan memicu kontroversi yang merugikan reputasi politisi itu sendiri. Oleh sebab itu, keterampilan mengelola gaya komunikasi di media menjadi elemen penting dalam strategi komunikasi politik yang berkelanjutan (Santoso, 2017)). Sayangnya, hingga kini masih sedikit penelitian yang secara spesifik membahas bagaimana anggota DPRD, khususnya di Surabaya, mempersiapkan dan menerapkan gaya komunikasi mereka saat tampil dalam talkshow. Kebanyakan kajian hanya menyoroti aspek retorika politik atau framing media, tanpa menyentuh aspek performatif dan strategi komunikasi dalam konteks media langsung. Penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut, dengan menelusuri secara lebih mendalam bagaimana anggota DPRD Kota Surabaya menyusun dan menampilkan gaya komunikasi mereka dalam acara talkshow, serta faktor-faktor apa saja yang memengaruhi cara mereka berinteraksi di ruang media. Lebih dari sekadar pengamatan visual, penelitian ini juga mengkaji berbagai aspek persiapan komunikasi politik mulai dari penyusunan materi berdasarkan isu aktual, pemilihan busana dan bahasa tubuh, latihan intonasi suara, hingga analisis karakteristik audiens. Semua ini ditelusuri dalam kerangka membangun komunikasi yang tidak hanya efektif secara teknis, tetapi juga memiliki daya sentuh emosional bagi publik.

Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pemahaman tentang pentingnya gaya komunikasi dalam membentuk citra politik yang positif dan membangun kedekatan dengan masyarakat. Selain kontribusi teoritis, temuan dari penelitian ini juga diharapkan memberikan manfaat praktis, khususnya bagi politisi, partai politik, dan lembaga penyiaran. Dalam era ketika persepsi publik sangat cepat terbentuk melalui potongan video atau narasi singkat di media sosial, gaya komunikasi politisi harus terus disesuaikan dengan kebutuhan zaman. Anggota DPRD tidak hanya dituntut untuk pintar berbicara, tetapi juga mampu mengolah cara penyampaian agar lebih membumi dan relevan dengan realitas konstituennya. Pada akhirnya, penelitian ini tidak hanya relevan dalam konteks komunikasi politik di Surabaya, tetapi juga dapat menjadi referensi yang lebih luas dalam membaca dinamika komunikasi politisi dalam media massa khususnya talkshow sebagai panggung interaksi yang paling manusiawi dan paling dekat dengan masyarakat. Komunikasi politik merupakan proses interaktif yang melibatkan penyampaian informasi antara politisi, media berita, dan public (FSM et al., 2020).

LANDASAN TEORI

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

Nama Penulis	Judul Penelitian	Tahun Penelitian	Perbandingan dengan penelitian ini	
			Persamaan	Perbedaan
Parwati Hadi Noorsanti dan Hayatul Cholsy	Gaya Interaksi Politikus Indonesia dalam Acara Talkshow di Televisi	2023	1. Menggunakan objek penelitian terkait gaya komunikasi. 2. Menggunakan subjek penelitian talkshow di Televisi	Meneliti terkait politikus Indonesia secara general, sementara penelitian ini memfokuskan anggota DPRD.
Fatimatuz Zahra	Analisis Gaya Komunikasi Politik pada Tokoh Politik (Studi pada	2022	1. Menggunakan objek penelitian terkait gaya komunikasi.	Menggunakan subjek penelitian tokoh politik pada Susilo Bambang Yudhoyono, sementara

	Susilo Bambang Yudhoyono)		2. Memfokuskan pada penelitian talkshow di Televisi	subjek penelitian ini terkait anggota DPRD.
Sofia Hasna	Gaya Komunikasi dan Bentuk Konstruksi Citra Politik Anggota Legislatif Perempuan di Indonesia	2023	1. Meneliti terkait gaya komunikasi lembaga legislatif dengan menggunakan interaksionalisme simbolik.	2. Objek penelitian tidak hanya tentang gaya komunikasi, tetapi juga konstruksi citra politik. Sementara, objek penelitian ini hanya gaya komunikasi. 3. Subjek penelitian tentang anggota legislatif perempuan secara general, sementara penelitian ini memfokuskan pada anggota DPRD.
Riniwaty Makmur	Gaya dan Karakter Komunikasi Politik Presiden Joko Widodo	2016	1. Objek penelitian terkait gaya komunikasi politik.	2. Menggunakan metode semiotika, sedangkan penelitian ini menggunakan interaksionalisme simbolik. 3. Obejk penelitian juga meneliti terkait karakter komunikasi politik, sedangkan penelitian ini hanya gaya komunikasi. 4. Subjek penelitian presiden Joko Widodo, sedngkan penelitian ini DPRD.
Cecep Effendi, Astriana Baiti Sinaga, Indah Sulistiani, Sa'diyah El Adawiyah	Gaya Komunikasi Kepemimpinan Jokowi	2023	Objek penelitian terkait gaya komunikasi politik.	Subjek penelitian tentang kepemimpinan Jokowi, sedangkan penelitian ini menggunakan subjek penelitian DPRD

Dari keseluruhan penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa gaya komunikasi politisi sangat dipengaruhi oleh karakter individu, konteks media, dan hubungan dengan audiens. Pengaruh paling besar adalah pada efektivitas politik kaum muda dewasa. Akan tetapi, belum ada kajian yang secara spesifik mengulas gaya komunikasi anggota DPRD dalam konteks talkshow media lokal, khususnya di Surabaya. Di sinilah letak keunikan sekaligus kontribusi dari penelitian ini, yaitu menjelajahi bagaimana anggota DPRD Kota Surabaya merancang, menyesuaikan, dan menampilkan gaya komunikasi mereka di ruang publik melalui talkshow media, dengan pendekatan interaksionisme simbolik sebagai bingkai analisis.

A. Interaksi Simbolik

Teori ini pertama kali dikembangkan oleh George Herbert Mead (1934) dan kemudian dipopulerkan oleh Herbert Blumer (1969). Teori ini menekankan bahwa manusia berinteraksi dengan menggunakan simbol-simbol yang memiliki makna tertentu, dan makna tersebut dikonstruksi melalui proses interaksi sosial. Dalam konteks komunikasi politik, simbol-simbol ini tidak hanya berupa kata-kata, tetapi juga ekspresi wajah, gestur tubuh, intonasi suara, dan elemen komunikasi non-verbal lainnya.

Beberapa Prinsip Utama dalam Teori Interaksi Simbolik:

1. Makna Dibentuk Melalui Interaksi Sosial

Individu memahami dunia sosialnya berdasarkan makna yang dibentuk dalam interaksi dengan orang lain. Dalam talkshow politik, misalnya, makna dari suatu pernyataan atau sikap politisi dipahami audiens berdasarkan pengalaman dan interpretasi mereka terhadap simbol-simbol yang digunakan.

2. Makna Ditafsirkan Secara Subjektif

Setiap individu dapat memiliki interpretasi yang berbeda terhadap simbol atau pesan yang disampaikan. Misalnya, gaya komunikasi seorang anggota DPRD yang menggunakan bahasa tegas dan gestur tangan tertentu dapat dipersepsikan sebagai tanda kepemimpinan oleh sebagian orang, tetapi dianggap sebagai sikap agresif oleh yang lain.

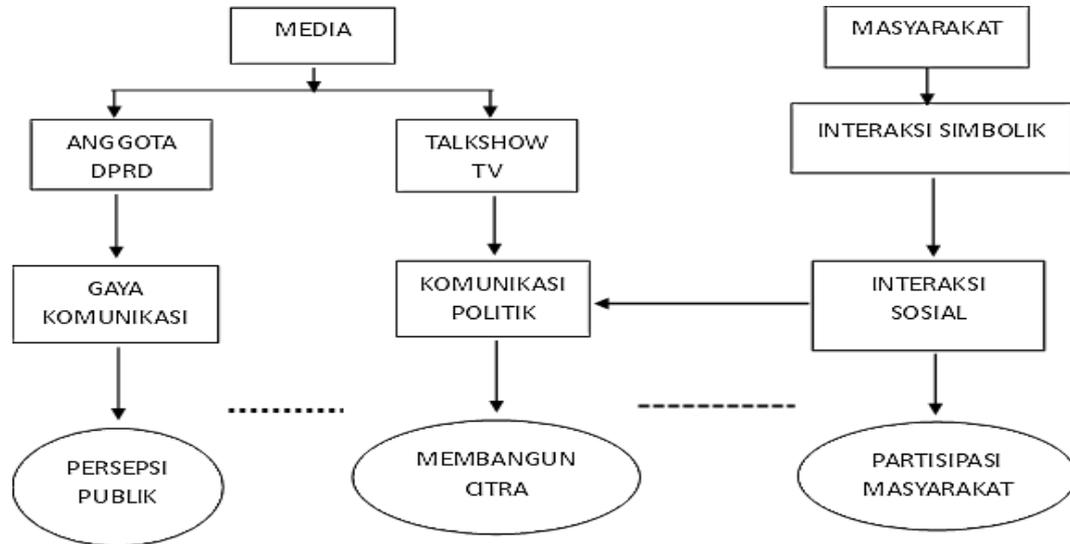
3. Komunikasi Sebagai Proses Negosiasi Makna

Dalam talkshow media, komunikasi bukan hanya sekadar penyampaian pesan dari anggota DPRD ke audiens, tetapi juga merupakan proses negosiasi makna. Pembawa acara, lawan bicara, maupun penonton dapat memberikan reaksi yang memengaruhi bagaimana pesan tersebut ditafsirkan dan diterima.

Dalam penelitian ini, teori interaksi simbolik digunakan untuk menganalisis bagaimana anggota DPRD membangun citra politik mereka melalui simbol-simbol komunikasi dalam talkshow media. Simbol-simbol seperti intonasi suara, pemilihan kata, kontak mata, dan ekspresi wajah memainkan peran penting dalam membentuk kesan di hadapan audiens. Dengan memahami bagaimana simbol-simbol ini digunakan dan

diinterpretasikan oleh masyarakat, penelitian ini dapat mengungkap bagaimana gaya komunikasi anggota DPRD memengaruhi persepsi publik dan efektivitas pesan politik yang mereka sampaikan.

B. Kerangka Penelitian



Gambar 1. Kerangka Penelitian

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma konstruktivisme. Pendekatan ini dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu memahami bagaimana anggota DPRD Kota Surabaya membentuk dan memaknai gaya komunikasi mereka ketika tampil dalam talkshow media. Paradigma konstruktivis berangkat dari pemahaman bahwa realitas sosial dibentuk melalui interaksi dan pengalaman subjektif individu (Umanailo, 2003). Dalam konteks ini, peneliti tidak hanya mengamati perilaku komunikasi, tetapi juga menelusuri makna-makna yang dikonstruksi dalam interaksi politik yang ditampilkan di ruang media. Metode yang digunakan adalah studi kasus deskriptif. Studi kasus dipilih karena memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap fenomena kontemporer dalam konteks kehidupan nyata (Yin, 2018). Fokus utama penelitian ini adalah gaya komunikasi anggota DPRD Kota Surabaya yang tampil sebagai narasumber dalam berbagai program talkshow, baik di televisi lokal maupun di media digital.

Tujuan studi ini adalah untuk menggambarkan secara rinci pola komunikasi verbal dan non-verbal yang digunakan dalam situasi publik yang bersifat dialogis dan interaktif. Subjek penelitian ditentukan dengan teknik purposive sampling, dengan kriteria: (1) aktif tampil sebagai narasumber dalam talkshow media, (2) berasal dari berbagai fraksi dan komisi, (3) memiliki peran signifikan dalam isu-isu publik di Kota Surabaya, dan (4) menunjukkan keberagaman gaya komunikasi—baik persuasif, argumentatif, maupun karismatik. Dengan kriteria tersebut, dipilih 5 hingga 7 anggota DPRD Kota Surabaya sebagai subjek penelitian untuk memperoleh data yang kaya dan bervariasi. Objek penelitian ini adalah gaya komunikasi yang ditampilkan oleh anggota DPRD saat tampil di talkshow media. Gaya komunikasi tersebut dianalisis dalam dua aspek utama: komunikasi verbal dan non-verbal. Komunikasi verbal mencakup pemilihan diksi, struktur bahasa,

teknik persuasi, dan cara menyampaikan argumen politik. Sementara itu, aspek non-verbal mencakup ekspresi wajah, gerak tubuh, kontak mata, intonasi suara, dan kecepatan bicara. Kedua aspek ini dianalisis untuk memahami bagaimana gaya komunikasi membentuk citra politik dan memengaruhi persepsi publik terhadap anggota DPRD sebagai representasi masyarakat. Wilayah penelitian mencakup Kota Surabaya, Jawa Timur, dengan sumber data berasal dari rekaman talkshow media yang menampilkan anggota DPRD Kota Surabaya, baik dalam bentuk tayangan televisi maupun siaran digital. Data tambahan diperoleh dari artikel berita, transkrip, dokumentasi acara, serta literatur relevan mengenai komunikasi politik. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi tidak langsung terhadap tayangan talkshow, dengan fokus pada aspek verbal dan non-verbal yang muncul selama proses interaksi.

Observasi ini dipadukan dengan analisis dokumentasi dan wawancara pendukung jika diperlukan. Seluruh data dianalisis menggunakan pendekatan tematik dari Creswell (2014), yang terdiri atas tahap reduksi data, kategorisasi tematik, interpretasi makna, serta penyajian naratif yang mendalam dan didukung oleh kutipan dari data asli. Untuk memastikan validitas data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik (Yin, 2018). Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari berbagai narasumber seperti anggota DPRD, pembawa acara, dan audiens. Sementara triangulasi teknik melibatkan penggabungan observasi, dokumentasi, dan wawancara sebagai instrumen pengumpulan data. Penelitian ini dijalankan selama enam bulan. Tahap pertama meliputi kajian literatur, penyusunan proposal, dan pengajuan izin penelitian. Tahap kedua adalah pengumpulan data selama tiga bulan, diikuti dengan proses analisis data dan interpretasi tematik selama satu bulan. Akhirnya, tahap penyusunan laporan dilakukan di bulan keenam untuk merumuskan hasil penelitian secara sistematis dan komprehensif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini melibatkan lima anggota DPRD Kota Surabaya periode 2024–2029 yang aktif sebagai narasumber dalam program talkshow media. Subjek dipilih melalui teknik purposive sampling berdasarkan keterwakilan partai, keterlibatan dalam forum publik, serta variasi gaya komunikasi. Adapun subjek terdiri atas:

1. Subjek A (Partai A – Dapil I)
2. Subjek B (Partai B – Dapil V)
3. Subjek C (Partai C – Dapil III)
4. Subjek D (Partai D – Dapil I)
5. [Subjek Kelima Placeholder]

Kelima subjek menunjukkan pendekatan komunikasi yang berbeda sesuai dengan karakteristik dapil masing-masing dan latar belakang personal mereka. Data diperoleh melalui observasi tayangan talkshow, dokumentasi media digital, dan wawancara langsung.

Tabel 2. Data Temuan Utama Penelitian Gaya Komunikasi Anggota DPRD dalam Talkshow Media

Nama Anggota DPRD	Partai Politik	Dapil	Gaya Komunikasi Verbal	Gaya Komunikasi Nonverbal	Strategi Komunikasi dalam Talkshow
Subjek A	Partai A	Dapil I	Lugas, berbasis data, akurat dan normatif	Ekspresi bersahabat, postur	Berstruktur, audience-

				percaya diri, kontak mata stabil	centered, berbasis isu publik
Subjek B	Partai B	Dapil V	Sistematis, berbasis solusi, logis, dan edukatif	Tenang, gestur spontan, suara stabil, percaya diri	Problem-solution, edukatif, audiens pragmatis
Subjek C	Partai C	Dapil III	Persuasif, naratif, religius, beretika	Lembut, ekspresi empatik, intonasi stabil dan reflektif	Value-driven, riset berbasis isu sosial keagamaan
Subjek D	Partai D	Dapil I	Teknis, formal, disederhanakan sesuai audiens	Gestur tenang, senyum hangat, kontak mata ringan	Analogi, simplifikasi istilah, sesuai karakter media
Subjek Kelima (placeholder)	holderparty	Dapil II	<i>Placeholder: untuk subjek kelima</i>	<i>Placeholder</i>	<i>Placeholder</i>

Table 3. Temuan kedua penelitian Gaya Komunikasi Anggota DPRD dalam Talkshow Media

No	Dimensi Temuan	Deskripsi Temuan	Implikasi Akademik
1	Representasi Gender	Mayoritas subjek adalah perempuan yang menampilkan gaya komunikasi empatik dan naratif.	Talkshow menjadi ruang artikulasi identitas politik berbasis gender.
2	Performativitas Politik	Komunikasi tidak hanya bersifat verbal, tetapi juga visual, simbolik, dan strategis.	Talkshow menjadi panggung konstruksi citra politik yang multimodal.
3	Kesiapan & Ketimpangan Kompetensi Komunikasi	Tidak semua anggota DPRD memiliki kapasitas yang seimbang dalam mengelola komunikasi di media.	Perlunya pelatihan komunikasi politik berbasis media kepada anggota DPRD.
4	Segmentasi Audiens Media	Audiens talkshow media sangat heterogen; politisi harus mampu menyederhanakan pesan tanpa kehilangan makna.	Pendekatan <i>audience-centered</i> menjadi penting dalam strategi komunikasi.
5	Talkshow sebagai Instrumen Akuntabilitas Politik	Talkshow membuka ruang transparansi dan evaluasi publik terhadap kinerja dan sikap politik.	Media menjadi aktor strategis dalam demokratisasi informasi legislatif.

Studi ini mengidentifikasi lima dimensi tambahan, yang memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman yang lebih luas tentang gaya komunikasi anggota DPRD dalam konteks acara bincang-bincang media. Dimensi pertama adalah representasi gender, dengan mayoritas subjek penelitian adalah perempuan. Hal ini menarik karena menunjukkan bahwa politisi perempuan dapat menempati ruang yang signifikan dalam komunikasi publik, khususnya dalam acara bincang-bincang media. Mereka tidak hanya tampil sebagai komunikator yang efektif, tetapi juga menekankan pendekatan yang empatik, naratif, dan berbasis nilai yang mengutamakan nilai-nilai sosial. Gaya komunikasi ini berfungsi sebagai strategi budaya yang tidak hanya menyampaikan pesan politik, tetapi juga membentuk citra perempuan dan memperluas legitimasi politik mereka di ruang publik yang seringkali didominasi oleh narasi maskulin. Dimensi kedua adalah performativitas politik, yang mengacu pada fakta bahwa penampilan di acara bincang-bincang tidak hanya melibatkan pesan verbal tetapi juga aspek visual, simbolik, dan ekspresif lainnya. Anggota

DPRD secara sadar membangun narasi melalui busana, intonasi, ekspresi wajah, dan bahkan postur tubuh sebagai bagian dari identitas politik yang ingin mereka proyeksikan. Dengan demikian, komunikasi politik di media tidak lagi hanya tentang "apa yang dikatakan," tetapi juga "bagaimana hal itu muncul." Acara bincang-bincang berfungsi sebagai platform performatif di mana politisi memproyeksikan citra ideal yang mereka inginkan agar diterima publik, memperkuat konsep komunikasi multimoda dalam politik kontemporer.

Dimensi ketiga yang teridentifikasi adalah kesenjangan kompetensi komunikasi antar legislator. Temuan ini menunjukkan bahwa tidak semua anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memiliki kesiapan dan keahlian yang sama dalam berkomunikasi di media. Beberapa menunjukkan penampilan yang kuat, artikulatif, dan terstruktur, sementara yang lain tampak canggung atau kurang adaptif terhadap format improvisasi seperti acara bincang-bincang. Hal ini menunjukkan perlunya pelatihan komunikasi media berbasis praktik untuk membekali politisi agar mampu menyampaikan pesan secara efektif di ruang siaran digital dan publik yang semakin kompetitif dan kritis. Dimensi keempat berkaitan dengan segmentasi audiens media, karena audiens acara bincang-bincang tidaklah homogen, melainkan sangat beragam dalam hal usia, latar belakang sosial, pendidikan, dan orientasi politik. Oleh karena itu, anggota DPRD dituntut untuk menguasai pendekatan yang berpusat pada audiens yang memungkinkan mereka menyederhanakan isu-isu kompleks dan menyesuaikan gaya penyampaian mereka dengan karakteristik audiens. Kemampuan berbicara dalam bahasa yang mudah dipahami tanpa kehilangan substansi merupakan indikator keberhasilan dalam membangun koneksi dengan audiens media. Dimensi terakhir dalam tabel ini menyoroti acara bincang-bincang sebagai instrumen akuntabilitas politik. Dalam format ini, publik memiliki kesempatan untuk menilai secara langsung sikap, opini, dan kinerja perwakilan mereka. Acara bincang-bincang menyediakan ruang dua arah yang memungkinkan pertanyaan kritis, klarifikasi kebijakan, dan tanggapan terhadap isu-isu terkini. Gaya komunikasi yang inklusif, reflektif, dan terbuka cenderung memperkuat citra positif seorang politisi, sementara gaya defensif atau manipulatif dapat merusak kepercayaan publik. Oleh karena itu, acara bincang-bincang bukan hanya sarana publisitas tetapi juga sarana untuk mempertanggungjawabkan mandat politik kepada konstituen secara langsung dan terbuka.

Secara keseluruhan, temuan tambahan dalam tabel ini menunjukkan bahwa gaya komunikasi anggota DPRD dalam acara bincang-bincang di media bukan sekadar soal berbicara teknis, tetapi juga strategi kompleks yang melibatkan identitas, representasi, kesiapan pribadi, dan relasi kuasa antara politisi dan publik. Dimensi-dimensi ini memperkuat kontribusi penelitian untuk memahami bagaimana komunikasi politik beroperasi di era media dan memperluas cakupan studi komunikasi dengan menekankan pentingnya konteks sosial, budaya, dan gender dalam membentuk efektivitas pesan-pesan politik.

Pembahasan

1. Gaya Komunikasi Verbal Anggota DPRD Surabaya

Hasil penelitian menunjukkan bahwa gaya komunikasi verbal para anggota DPRD Kota Surabaya sangat dipengaruhi oleh karakteristik dapil, latar belakang profesional, serta identitas partai. Misalnya, Subjek A (partai A) menunjukkan gaya verbal yang lugas dan berbasis data. Gaya ini cocok dengan konstituen Dapil I yang berpendidikan tinggi dan kritis terhadap isu publik. Subjek B (partai B) menggunakan pendekatan sistematis dan solutif, mencerminkan latar belakangnya di bidang kesehatan dan penguasaan substansi kebijakan. Sementara itu, Subjek C (partai C)

menampilkan gaya naratif dan persuasif dengan penekanan pada nilai-nilai kolektif dan religiusitas, sesuai dengan segmentasi masyarakat Dapil III. Subjek D (Partai D) cenderung mengadopsi gaya formal dan edukatif, dengan penyesuaian diksi terhadap keragaman masyarakat yang ada di Dapil I. Gaya komunikasi verbal ini mencerminkan pendekatan retorik seperti ethos, logos, dan pathos yang dijelaskan (Aristotle, 2007), di mana anggota DPRD mengandalkan kredibilitas, logika argumentasi, dan kedekatan emosional untuk menjangkau publik.

2. Gaya Komunikasi Nonverbal dan Simbolik

Aspek nonverbal juga menjadi penanda penting dalam membangun citra politisi. Misalnya, Subjek B dan Subjek B memperlihatkan postur tubuh yang tegas dan gestur yang stabil sebagai simbol ketegasan. Subjek C dan Subjek D cenderung menunjukkan ekspresi lembut dan kontak mata yang bersahabat, menggambarkan empati dan kehangatan sebagai ciri khas politisi perempuan dalam konteks komunikasi publik. Temuan ini memperkuat teori Knapp & Hall (2010) bahwa komunikasi nonverbal berfungsi tidak hanya untuk mendukung verbal, tetapi juga membentuk persepsi tentang kepribadian dan kredibilitas komunikator (Knapp et al., 2013). Sikap tubuh, intonasi, dan ekspresi wajah yang konsisten memberi kesan profesional, empatik, atau bahkan otoritatif sesuai dengan citra yang ingin dibangun. Menurut Allen, dkk (2009) gaya komunikasi Attentive Style dimana dalam berkomunikasi dengan komunikan, komunikator memosisikan dirinya lebih sebagai pendengar yang aktif, simpatik, dan empatik. Selain itu, gaya komunikasi Friendly Style merupakan komunikator bersikap ramah, sopan, dan intimate saat menyampaikan pesan kepada komunikan atau lawan bicaranya selaku penerima pesan. Kedua hal tersebut sejalan dengan gaya komunikasi Subjek D.

3. Strategi Komunikasi dan Konteks Talkshow

Dalam konteks talkshow, keempat subjek yang dianalisis menunjukkan pemahaman akan kebutuhan untuk menyesuaikan pesan dan gaya komunikasi dengan format acara dan karakteristik audiens. Strategi audience-centered yang ditunjukkan oleh Subjek A, B, dan C, misalnya, memperlihatkan kemampuan mereka dalam mengadaptasi narasi agar relevan dengan isu publik dan diterima oleh segmen pemirsa media. Strategi komunikasi subjek A yang terstruktur namun fleksibel, pendekatan edukatif subjek B, serta narasi nilai dan kedekatan sosial dari subjek C dan D menunjukkan bahwa talkshow tidak hanya dimanfaatkan sebagai ruang penyampaian pendapat, tetapi juga sebagai ruang membangun identitas politik. Hal ini sejalan dengan konsep Scammell (1995) mengenai political branding, di mana gaya komunikasi harus sejalan dengan identitas partai dan citra personal yang ingin ditampilkan.

4. Keterkaitan Gaya Komunikasi, Identitas Partai, dan Segmentasi Dapil

Penelitian ini mengungkap bahwa gaya komunikasi anggota DPRD tidak dapat dilepaskan dari dua elemen utama: ideologi partai dan segmentasi dapil. Gaya lugas dan nasionalis subjek A konsisten dengan identitas partai A, gaya profesional dan solutif Subjek B mencerminkan citra partai B yang teknokratis, gaya religius dan empatik subjek C mencerminkan nilai dakwah partai C, serta gaya komunikatif dan moderat subjek D mencerminkan identitas partai D yang inklusif. Segmentasi dapil turut menentukan corak komunikasi. Di dapil urban seperti Dapil I dan III, pendekatan rasional dan berbasis data tampak lebih dominan. Sementara dapil yang heterogen dan religius mendorong penggunaan pendekatan emosional dan naratif berbasis nilai.

5. Talkshow sebagai Ruang Artikulasi Identitas, Citra Politik, dan Akuntabilitas Publik

Namun, studi ini juga menemukan kesenjangan kompetensi komunikasi di antara anggota DPRD. Beberapa peserta menunjukkan kemampuan yang kuat dalam mengartikulasikan dan menyampaikan gagasan secara meyakinkan, sementara yang lain tampak kaku atau tidak responsif terhadap dinamika acara bincang-bincang yang spontan dan interaktif. Keterbukaan ini menunjukkan bahwa tidak semua anggota DPRD memiliki kesiapan yang sama untuk tampil di media, sehingga memerlukan pelatihan komunikasi media untuk meningkatkan kapasitas mereka secara menyeluruh. Tantangan lainnya adalah sifat audiens acara bincang-bincang yang sangat heterogen, baik dari segi usia, latar belakang pendidikan, maupun preferensi politik. Oleh karena itu, kemampuan untuk menyampaikan kebijakan, menjaga relevansi pesan, dan menyesuaikan gaya komunikasi dengan karakteristik audiens menjadi krusial. Peserta yang menggunakan pendekatan yang berpusat pada audiens cenderung lebih berhasil dalam membangun hubungan baik dan memengaruhi persepsi publik. Menciptakan kesan yang baik dan menarik bagi masyarakat tentu saja dilakukan oleh politisi perempuan, meskipun tidak semua orang akhirnya dapat menilainya dengan baik. Kinerja politisi perempuan masih dianggap buruk karena tidak dapat mencapai target representasi perempuan sebesar 30% (Syammaella et al., 2024). Acara bincang-bincang, dalam konteks ini, tidak hanya berfungsi sebagai media publisitas politik tetapi juga sebagai instrumen akuntabilitas. Melalui format yang memungkinkan pertanyaan langsung dan reaksi spontan dari publik, para politisi diuji kemampuannya dalam menjelaskan kebijakan, menanggapi kritik, dan menyampaikan komitmen secara terbuka. Gaya komunikasi yang terbuka, jujur, dan reflektif dalam acara bincang-bincang memberikan kontribusi positif bagi citra politisi dan memperkuat kepercayaan publik. Sebaliknya, gaya yang manipulatif, tidak konsisten, atau terlalu defensif berpotensi melemahkan legitimasi politik yang telah mapan. Oleh karena itu, kemampuan mengelola komunikasi secara strategis dalam acara bincang-bincang menjadi semakin penting bagi anggota DPRD, tidak hanya untuk menyampaikan informasi tetapi juga untuk membangun kredibilitas dan rasa keterikatan dengan konstituen di era media yang serba cepat dan dinamis ini.

Selain menunjukkan keragaman gaya komunikasi verbal dan nonverbal, studi ini juga mengungkap dimensi yang lebih mendalam dalam konteks komunikasi politik di antara anggota Dewan Kota Surabaya (DPRD) dalam acara bincang-bincang. Salah satu temuan penting adalah representasi perempuan yang dominan sebagai pembicara. Empat dari lima subjek adalah anggota DPRD perempuan yang secara konsisten menampilkan gaya komunikasi yang empatik, naratif, dan berbasis nilai. Hal ini menunjukkan bahwa politisi perempuan bukan sekadar pembawa pesan, tetapi juga aktor politik yang telah berhasil membangun identitas komunikatif yang khas dan strategis di ruang publik yang cenderung didominasi laki-laki. Acara bincang-bincang menyediakan ruang bagi mereka untuk tampil lebih manusiawi, reflektif, dan menarik bagi publik, sekaligus menunjukkan otoritas politik yang setara dengan rekan-rekan pria mereka. Lebih lanjut, acara bincang-bincang juga berfungsi sebagai panggung pertunjukan politik, di mana gaya komunikasi tidak hanya mencerminkan isi pesan tetapi juga berfungsi sebagai alat pembangun citra politik multimoda. Pilihan pakaian, ekspresi wajah, intonasi, dan bahkan postur tubuh merupakan bagian penting dari narasi identitas yang ingin dibangun oleh para politisi. Hal ini memperkuat pemahaman bahwa komunikasi politik di era media digital tidak semata-mata berbasis kata-kata, tetapi juga visual dan simbol.

KESIMPULAN

Penelitian ini mengungkap bahwa gaya komunikasi anggota DPRD Kota Surabaya dalam talkshow media merupakan hasil dari proses adaptasi yang kompleks, mencerminkan perpaduan antara karakter personal, nilai-nilai partai, serta segmentasi masyarakat daerah pemilihan mereka. Setiap anggota DPRD menampilkan gaya komunikasi yang unik, baik dari sisi verbal, nonverbal, maupun strategi dalam menyampaikan pesan kepada publik. Secara verbal, anggota DPRD menunjukkan keberagaman dalam pemilihan diksi, struktur argumentasi, serta penyampaian narasi. Ada yang memilih gaya yang lugas dan berbasis data, ada pula yang menggunakan pendekatan naratif, emosional, atau teknis yang disederhanakan. Gaya komunikasi ini menunjukkan upaya untuk menjangkau publik secara luas dengan mempertimbangkan konteks media dan karakter audiens. Dari aspek nonverbal, para anggota DPRD memanfaatkan ekspresi wajah, gestur tubuh, intonasi, dan postur sebagai pelengkap penting dalam memperkuat pesan politik. Nonverbal menjadi penanda sikap empati, kepercayaan diri, atau ketegasan, yang turut membentuk persepsi publik terhadap kepribadian dan kredibilitas mereka. Sementara itu, strategi komunikasi yang diterapkan dalam talkshow menunjukkan kesiapan dan kemampuan adaptasi yang tinggi. Para politisi tidak hanya menyampaikan pendapat, tetapi juga membangun koneksi dengan audiens melalui pesan-pesan yang relevan, terstruktur, dan disesuaikan dengan isu-isu aktual. Mereka memahami pentingnya menyederhanakan bahasa teknis dan menjaga konsistensi gaya dengan karakter partai serta nilai-nilai yang ingin dibangun di hadapan publik. Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa gaya komunikasi di ruang media tidak sekadar refleksi personal, tetapi merupakan strategi politik yang dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuk segmentasi konstituen, pengalaman politik, latar belakang profesi, dan dinamika sosial di tingkat lokal. Gaya komunikasi yang tepat dapat menjadi kunci dalam membangun citra positif, meningkatkan kepercayaan publik, dan memperkuat posisi politik seorang legislator di mata masyarakat.

REFERENSI

- Aristotle. (2007). *Aristotle - On Rhetoric (Oxford, 2007)* (G. A. KENNEDY, Trans.; 2nd ed.). Oxford University Press.
- Cangara, H. (2009). *Komunikasi politik: konsep, teori, dan strategi*. Rajawali Pers. <https://books.google.co.id/books?id=-wANAQAAMAAJ>
- Fadillah, D., dan Najih Farihanto, M. M., & Universitas Ahmad Dahlan, M. (2017). *KOMUNIKASI POLITIK ANTAR KOALISI PARLEMEN DI DPR RI* (Vol. 5, Issue 1).
- Farni Syam Maela, N., Mustika Elita, F., Rijal, E., & Mulyana, S. (2018). *Political Communication Competence of Women Legislators*.
- Fsm, N. (2018). *KOMUNIKASI POLITIK ANGGOTA LEGISLATIF PEREMPUAN DI KOTA MAJALENGKA POLITICAL COMMUNICATION OF FEMALE LEGISLATORS IN MAJALENGKA CITY*.
- FSM, N., Elita, F. M., Rijal, E., & Mulyana, S. (2020). Online Political Communication: Identity, e-representation and Self-presentation on Women's Legislatif Members. *International Journal of Psychosocial Rehabilitation*, 24(02), 1726–1737. <https://doi.org/10.37200/ijpr/v24i2/pr200474>

- Haris, A., Amalia, A., & Hanafi Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Riau Jl Jl Tuanku Tambusai, K. (n.d.). *Communiiverse : Jurnal Ilmu Komunikasi CITRA POLITIK ANIES BASWEDAN DI MEDIA MASSA*.
- Heryanto, G. G. (2018). *Media Komunikasi Politik* (A. Giddan & S. Rumaru, Eds.). IRCiSoD. <https://books.google.co.id/books?id=Pqy-DwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id#v=onepage&q&f=false>
- Knapp, M. L., Hall, J. A., & Horgan, G. T. (2013). *Nonverbal Communication in Human Interaction* (8th ed.). Cengage Learning. https://books.google.co.id/books/about/Nonverbal_Communication_in_Human_Interac.html?id=rWoWAAAAQBAJ&redir_esc=y
- MAJID, N. (2023). Strategi Komunikasi Politik Dalam Pemilihan Umum Di Era Digital. *PERSEPTIF: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 1(2), 53–61. <https://doi.org/10.62238/perseptifjurnalilmusosialdanhumaniora.v1i2.34>
- Muchtar, K. (2016). Komunikasi Politik dan Pembentukan Citra Partai. In *Jurnal Ilmu Komunikasi* (Vol. 14, Issue 2). halaman.
- Pertiwi Hele, A., Farni, N., & Maela, S. (2018). *Peningkatan Pelayanan Berbasis Strategi Komunikasi Organisasi pada RSUD Luwu*. 2(1), 39–54. <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/jkp>
- Pureklolon, T. T. (2018). *Komunikasi Politik : Thomas Tokan Pureklolon : Free Download, Borrow, and Streaming : Internet Archive*. PT Gramedia Pustaka Utama. https://archive.org/details/komunikasi-politik_202301
- Santoso, L. S. (2017). Etnografi Warung Kopi: Politik Identitas Cangkrukan di Kota Surabaya dan Sidoarjo. *MOZAIK HUMANIORA*, 17(1), 113–113. <https://doi.org/10.20473/MOZAIK.V17I1.6594>
- Supriadi, Y. (2017). Komunikasi Politik DPRD Dalam Meningkatkan Peran Legislasi di Kota Bandung. *Mediator: Jurnal Komunikasi*, 10(1), 25–36. <https://doi.org/10.29313/mediator.v10i1.2119>
- Syammaella, N. F., Farida, F., Harliantara, H., & Prihatiningsih, W. (2024). Self Interpretation: The Identity of Women Legislator. *Jurnal Komunikasi Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia*, 8(2), 310–323. <https://doi.org/10.25008/JKISKI.V8I2.771>